



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 02 /KEP/DISHUB-LK/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan
2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)
- a. Tugas :
- a) Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
 - b) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c) Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dan Kuasa Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 551/02 /KEP/DISHUB-LK/I/2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019
 TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	Aldasman, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 	Nurmi Yenti, S.Sos

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal 17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 	Marta Aldila, S.Sos
2	Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Orlanda, ST, MT	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 2. Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan 3. Sosialisasi / Penyuluhan tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 4. Pengadaan Marka Jalan 5. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 6. Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte 	Husni Ananda, S.Sos Akhyar, SE, MM Rusdi, ST

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 8. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 9. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU 	
3	Bidang Lalu Lintas	Erizal, S.ST	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 4. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 5. Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu-Tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 6. Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir 	<p>Ifnaldi</p> <p>Boy Chandra, S.Sos</p> <p>Dadang Eri Putra, S.SiT</p>
4	Bidang Angkutan	Irwandi, SH	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 	Mukni

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3. Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Mohammad Rehatta, SH
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5. Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan	
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	

Di Tetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/348/KEP/DISHUB-LK/V/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NOMOR : 551/02/KEP/DISHUB-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban

- pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan
2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)
- a. Tugas :
- a) Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
 - b) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c) Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dan Kuasa Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Mei 2019

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 27 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/348/KEP/DISHUB-LK/V/2019

TANGGAL : 27 MEI 2019

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NOMOR : 551/02/KEP/DISHUB-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	Aldasman, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 	Nurmi Yenti, S.Sos

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal 17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 	Marta Aldila, S.Sos
2	Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Orlanda, ST, MT	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 2. Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan 3. Sosialisasi / Penyuluhan tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 4. Pengadaan Marka Jalan 5. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 6. Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte 	Husni Ananda, S.Sos Akhyar, SE, MM Rusdi, ST

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 8. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 9. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU 	
3	Bidang Lalu Lintas	Ifnaldi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 4. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 5. Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu-Tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 6. Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir 	<p>Erizal, S.ST</p> <p>Boy Chandra, S.Sos</p> <p>Dadang Eri Putra, S.SiT</p>
4	Bidang Angkutan	Irwandi, SH	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 	Mukni

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3. Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Mohammad Rehatta, SH
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5. Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan	
			- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	

Di Tetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 27 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/368/KEP/DISHUB-LK/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NOMOR : 551/ 348 /KEP/DISHUB-LK/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban

- pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan
2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)
- a. Tugas :
- a) Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
 - b) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c) Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- b. Tanggung Jawab :
- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dan Kuasa Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 01 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/368/KEP/DISHUB-LK/VIII/2019

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NOMOR : 551/348/KEP/DISHUB-LK/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	Aldasman, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 	Nurmi Yenti, S.Sos

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal 17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 	Marta Aldila, S.Sos
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dadang Eri Putra, S.SiT	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 2. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 3. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 4. Pengadaan Marka Jalan 5. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU 7. Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu-Tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 	<p>Husni Ananda, S.Sos</p> <p>Muhammad Ali Akbar, S.Sos</p> <p>Boy Chandra, S.Sos</p>

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 4. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 5. Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus 6. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 	<p>Ifnaldi</p> <p>Akhyar, SE, MM</p>

Di Tetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010